

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Hornby. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- A.V. Dicey. 1915. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan and Co.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- F.A.M. Stroink & J.G. Steenbeek. 1983. *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Belanda: Samsom.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Ali. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moh. Uzer Usman. 2004. *Menjadi Profesional di Bidang Pekerjaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otje Salman dkk. 2005. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Bareskrim Polri.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal, Tesis, dan Disertasi

A. Mahbub Ulhaq. 2023. Batas Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Amanda Rizda Fitria Hutasuhut dan Rachmad Abduh. 2022. Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor. *Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 1 No. 1.

Firdaus Pasue. 2017. Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengeledahan dalam Pasal 32-37 KUHP. *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 5. <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17709>.

Friesco Queen Inaray, dkk. 2024. Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyidik Pada Subdit II Harda Bangtah Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 4.

Hamka Muhammad. 2023. Kedudukan Hukum Prosedur Operasional Standar dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Disertasi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muhammad Amdi Karna, dkk. 2024. Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, Januari.

Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyth Prakarsa. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>